

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

The Influence of Human Resources Competence, Local Government Information Systems (SIPD), Internal Control Systems on The Quality of Local Government Financial Reports

Siti Hardiyati Indah Nurpala^{1*}, Muhammad Fachruddin Arrozi²

Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: falah.indah@student.esaunggul.ac.id^{1*}, arrozi.esaunggul.ac.id²

Abstract

This study aims to determine the effect of human resource competence, local government information systems, internal control systems on the quality of local government financial reports. The population in this study is the expenditure treasurer's share of the SKPD in the Provincial Government of DKI Jakarta with a total of 42 SKPD. The data used is primary data with a quantitative descriptive approach obtained from respondents through distributing questionnaires. Therefore, the data analysis used is an analysis in the form of multiple linear regression tests. The results of this study indicate that, simultaneously on the variable competence of human resources, local government information systems and internal control systems have a significant effect on the quality of local government financial reports. This is evidenced by the results of the simultaneous test (Test F). And partially shows the results of human resource competencies, local government information systems and internal control systems have a significant effect on the quality of local government financial reports. This is proven from the partial test (t test).

Keywords: *Quality of local government financial reports, competence of human resources, local government information systems, internal control systems.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian bendahara pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 42 SKPD. Data yang digunakan adalah data primer dengan pendekatan deskriptis kuantitatif yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan adalah analisis dalam bentuk uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara simultan pada variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari hasil uji simultan (Uji F). Dan secara parsial menunjukkan hasil kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari uji parsial (Uji t).

Kata kunci: *Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah, sistem pengendalian intern.*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur tentang posisi dan transaksi keuangan suatu entitas (Armeli et al, 2017). Pada saat menyajikan laporan keuangan pemerintah harus memberikan informasi yang akurat dan berguna sehingga pengguna dapat menilai transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan dalam membuat keputusan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan APBD keuangan mereka dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Laporan keuangan ini harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemangku kepentingan akan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah untuk membuat keputusan, yang diharapkan akan menghasilkan pemerintah yang lebih baik dan inovatif. Laporan keuangan dapat dikatakan bermutu bila laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan wajib mempunyai empat ciri ialah relevan, andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP, 2010).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah erat kaitannya dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Maka sebab itu, pengelolaan keuangan daerah harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berpengalaman dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas tinggi untuk memastikan pemerintah yang baik. Namun sudah menjadi permasalahan yang sering terjadi bahwa dalam instansi pemerintah daerah penataan pegawai seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan kualitas maupun kuantitas. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa SKPD/UKPD yang seringkali menempatkan pegawai tidak sesuai dengan jabatan pegawai atau tidak memiliki kompetensi dan sertifikat sebagai bendahara keuangan bahkan menempatkan pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) sebagai pengelola laporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mengutamakan otoritas sementara sumber daya manusia saat ini tidak memenuhi kompetensi yang seharusnya (Aruan, 2003), sehingga pemerintah harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hasil observasi dari SKPD menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dibuat oleh akuntan yang berada dalam bidang akuntan, informasi yang digunakan adalah informasi yang akurat, dibuat pada periode dan selalu tepat waktu serta mudah dipahami sedangkan pada laporan keuangan kurang dapat diakses melalui website pemerintah daerah.

Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 (2013) tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Kompetensi ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Cahyandari & Triyono (2017) yang

menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, temuan ini bertentangan dengan penelitian Sanjaya (2017) yang menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil observasi menyatakan responden tidak berpendapat tentang Pemerintah Daerah selalu melakukan evaluasi mengenai kompetensi kepegawaian.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan adanya suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan, yaitu sistem yang dapat mengolah data-data dan menghasilkan informasi secara tepat, jelas, dan terstruktur. Salah satu undang-undang yang mendasari penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 (2014) tentang Pemerintah Daerah, Perpres Nomor 95 (2018) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres Nomor 39 (2019) tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dengan landasan tersebut maka menteri dalam negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 (2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka, dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan di bidang keuangan negara terutama pada instansi pemerintah, kemudian pemerintah daerah mengeluarkan aturan pelaksanaan salah satunya dalam bentuk Permendagri Nomor 70 (2019) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dirancang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih Adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berbasis web digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait pelaporan keuangan yang disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing instansi pemerintah daerah yang mampu menangani, menghubungkan, dan mempermudah proses konsolidasi data antara entitas akuntansi (SKPD) dengan entitas pelaporan (SKPKD), sehingga data di pemerintah daerah dapat terintegrasi dengan lancar, namun masalah yang terdapat bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sering terjadi ketidaksinkronan antara data yang diinput dengan hasil output akhir sehingga perlunya dilakukan pengecekan manual lagi oleh pembuat laporan keuangan. SIPD menjadi bagian e-government memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah dan dapat mendorong transparansi dan keterbukaan publik di daerah (Sudianing & Seputra, 2019). Hal ini didukung dengan kualitas laporan keuangan telah dilakukan secara relevan, andal dan dapat dibandingkan. Hasil observasi menyatakan responden tidak berpendapat pada pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi dengan baik dan jumlah SDM Teknologi Informasi Komputer untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sistem Pengendalian Intern adalah komponen selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kualitas informasi laporan keuangan tidak meningkat adalah kegagalan sistem pengendalian internal untuk berfungsi dengan baik. Untuk mencegah kemungkinan besar penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBD), auditor internal seharusnya melakukan review terus menerus sepanjang proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan. Hasil dari kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini adalah penggunaan anggaran yang tepat sasaran sesuai dengan rencana atau rencana anggaran biaya (RAB). Sistem Pengendalian Internal (SPI) bertanggung jawab untuk memberikan kepercayaan yang cukup untuk keberhasilan dan efisiensi proses akuntansi, terutama dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Dengan demikian, penerapan Sistem Pengendalian Internal dapat meningkatkan reliabilitas, objektivitas dan pencegahan inkonsistensi serta memudahkan proses audit laporan keuangan. Sistem Pengendalian Internal yang baik juga mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan atau perhitungan, yang mengurangi kemungkinan kekeliruan yang dialami pemerintah daerah. Hal ini didukung dari penelitian Rifky et al (2017) yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian Cahyandari & Triyono (2017) yang menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti guna menemukan permasalahan, sehingga hasil yang diperoleh oleh peneliti menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum bisa dinyatakan seratus persen sempurna, hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang masih mengalami kendala baik dari segi sumber daya manusianya serta sistem yang masih digunakan saat ini oleh pemerintahan. Kompetensi sumber daya manusia sangatlah berperan penting bagi organisasi, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut perlu diadakannya pelatihan bagi pegawai pemerintahan. Pelatihan seperti kepemimpinan dan lain sebagainya akan meningkatkan kerjasama para pegawai dan akan berdampak pada kinerja yang dihasilkan. Mengenai sistem informasi yang telah dijalankan saat ini sudah sesuai dan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan, namun tetap saja pemerintah harus selalu melakukan pengawasan terhadap sistem informasi, serta menilai apakah sistem informasi tersebut dapat membantu kualitas kerja menjadi lebih baik atau tidak. Selanjutnya mengenai sistem pengendalian internal sudah cukup baik dengan adanya beberapa tindakan pengawasan yang ada, namun tetap saja harus dilakukan evaluasi sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dapat segera diatasi dan dapat dilakukan penilaian ulang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Akuntansi Normatif

Teori akuntansi normatif disebut juga dengan teori preskriptif, yang mencoba menjawab pertanyaan “apa yang semestinya”. Dalam teori ini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku atau dipraktekkan sekarang atau tidak. Teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktekkan, misalnya pernyataan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan seharusnya didasarkan pada metode pengukuran aktiva tertentu. Menurut Nelson (1973) dalam literature akuntansi teori normatif sering dinamakan teori apriori (artinya dari sebab ke akibat dan bersifat deduktif). Alasannya teori normatif bukan dihasilkan dari penelitian empiris, tetapi dihasilkan dari kegiatan “*semi-research*”. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktekkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Pada awal perkembangannya, teori akuntansi normatif belum menggunakan pendekatan investigasi, dan cenderung disusun untuk menghasilkan postulat akuntansi. Pada kebanyakan kasus, teori ini didasarkan pada konsep ekonomi pengambilan keputusan yang rasional dan merupakan teori pengukuran akuntansi. Karena teori normatif dianggap merupakan pendapat pribadi yang subyektif maka tidak bisa diterima begitu saja, harus dapat diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Pendukung teori ini biasanya menggambarkan system akuntansi yang dihasilkan sebagai sesuatu yang ideal, merekomendasikan pengganti system akuntansi *cost histories* dan pemaian teori normatif oleh semua pihak.

Teori Persepsi

Yang dimaksud dengan Teori Persepsi adalah bagaimana orang melihat atau menafsirkan suatu peristiwa atau kejadian, objek atau orang lain. Orang bertindak laku menurut persepsinya tanpa memperhatikan apakah persepsinya sesuai atau tidak dengan kenyataan yang ada. Gary Siegel dan Helene Ramanauskas-Marconi (1989) mendefinisikan persepsi sebagai berikut:

“Perception is the process by which we select, organize, and interpret stimuli into a meaningful and coherent picture of the world.”

Stephen P. Robbins (1998) menguatkan pendapat diatas dengan mendefinisikan persepsi sebagai berikut:

“Perception is a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi seseorang tergantung dari physical stimuli dan individual predispositions. Physical stimuli adalah input sensorik yang masih mentah seperti pandangan, suara, dan sentuhan sedangkan

individual predispositions meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pembelajaran di masa lalu, dan pengharapan. Persepsi seseorang berbeda-beda karena individual sensory receptors-nya mungkin berfungsi secara tidak sama, tetapi karena perbedaan predispositions (Siegel dan Ramanauskas, 1989). Siegel dan Ramanauskas juga menyebutkan bahwa ada empat faktor lain yang berhubungan dengan individual predispositions, yaitu familiarity, feeling, importance, dan emotions. Ada suatu tendensi bahwa seseorang akan mencari lebih banyak informasi tentang sesuatu saat memiliki perasaan positif maupun negatif yang kuat. Begitu juga semakin penting seseorang atau obyek, semakin banyak informasi yang dicari. Dengan kata lain semakin banyak informasi yang tersedia mengenai obyek, maka semakin baik persepsi mengenai obyek tersebut. Emosi seseorang juga dapat memengaruhi persepsi, persepsi dapat berbeda-beda tergantung dari apakah seseorang sedang mengalami hari yang baik atau hari yang buruk, apakah seseorang sedang merasa gembira atau tertekan.

Teori Perilaku

Sarwono (1993) menggambarkan perilaku sebagai interaksi antara orang-orang yang nyata. Perilaku adalah sesuatu yang konkret yang dapat diamati, dicatat, dan dipelajari, berbeda dengan pikiran dan perasaan, menurut Morgan (1986). Menurut Walgito (1994), ada dua jenis perilaku atau aktivitas yaitu perilaku yang tampak (*Overt behavior*) dan perilaku yang tidak tampak (*innert behavior*). Chaplin (1999) membahas perilaku dalam dua arti, pertama perilaku dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dialami seseorang, dalam arti sempit itu adalah segala sesuatu yang mencakup reaksi yang dapat diamati. Perilaku, menurut kamus bahasa Indonesia adalah reaksi seseorang terhadap Gerakan atau sikap (gerakan badan atau ucapan). Ahli psikologi Skinner (1983) mengatakan bahwa perilaku adalah tanggapan seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena itu, proses: Stimulus Organisme Respons adalah bagaimana perilaku manusia terjadi. sehingga teori Skinner ini disebut teori "S-O-R".

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Ikatan Akuntan Indonesia (2015), adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi, kinerja keuangan dan arus kas entitas sehingga sebagian besar pengguna laporan keuangan dapat menggunakannya untuk membuat keputusan ekonomi. Pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang diberikan juga ditunjukkan dalam laporan keuangan. Oleh karena laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, laporan tersebut harus dipresentasikan secara relevan, dapat diandalkan, dan harus disertai dengan pengungkapan yang

memadai (*disclosure*) mengenai informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Laporan keuangan dibuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang ideal memenuhi syarat-syarat kualitatif dan dapat dipertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Publik akan menggunakan laporan ini sebagai pedoman untuk membuat kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karakteristik kualitas laporan keuangan adalah standar yang harus dipenuhi oleh informasi akuntansi sehingga dapat mencapai tujuannya. Keempat karakteristik ini adalah standar kualitas yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami.

- (1) Relevan, Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang dimasukkannya memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap serta dapat membantu pengguna untuk membuat keputusan.
 - a. Memiliki manfaat prediktif berarti bahwa informasi dapat membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil dan kejadian masa lalu.
 - b. Tepat waktu, informasi yang disajikan tepat waktu mempengaruhi pengambilan keputusan.
 - c. Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah harus lengkap dan jelas untuk mencegah kekeliruan.
- (2) Andal, Laporan keuangan berisi informasi yang jujur dan dapat diverifikasi, bebas dari tafsiran yang menyesatkan dan kesalahan substansial.
 - a. Penyajian jujur berarti informasi yang menggambarkan transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar.
 - b. Dapat diverifikasi, laporan keuangan dapat diuji, dan hasilnya konsisten jika dilakukan oleh berbagai pihak berulang kali.
 - c. Netralitas, informasi dimaksudkan untuk kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan individu tertentu.
- (3) Dapat dibandingkan, Informasi dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya secara keseluruhan.
 - a. Memiliki daya banding
 - b. Mampu memberikan informasi perbandingan antar periode
 - c. Memiliki saldo normal
- (4) Dapat dipahami, Laporan keuangan jelas dan mudah dipahami.
 - a. Disusun dengan jelas dan mudah
 - b. Disusun berdasarkan siklus akuntansi

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Yuhertiana (2021) menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang, organisasi (kelembagaan), atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia dibagi menjadi dua kategori. Sumber daya manusia mikro mencakup karyawan yang bekerja untuk pemerintahan atau organisasi yang lebih luas, sedangkan sumber daya manusia makro mencakup orang-orang yang telah mencapai usia produktif untuk menjadi karyawan atau pegawai. Orang-orang yang belum bekerja juga dianggap makro karena usia mereka sudah mencapai usia produktif sebagai pegawai atau karyawan. Secara umum, sumber daya manusia adalah asset yang dimiliki oleh pemerintahan atau perusahaan yang bekerja di sana. Jika dilatih dan dikembangkan dengan baik, mereka dapat membantu organisasi berkembang. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus berkompeten dengan memperhatikan aspek berikut:

- (1) Pengetahuan adalah kemampuan yang kompleks yang diukur melalui tes pengetahuan.
- (2) Pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik.
- (3) Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik dan mental.
- (4) Pengalaman adalah pelajaran yang dapat diambil untuk digunakan di masa depan.
- (5) Tanggung Jawab adalah kesadaran manusia akan tindakan atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja,

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 (2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 (2014) tujuan pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah agar pengelolaan informasi daerah dapat dilakukan secara professional serta menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintah Daerah lainnya. Selain itu, adanya tuntutan dalam proses perencanaan pembangunan yang diamanatkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 (2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membuat Pemerintah terpacu untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan. Sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mengatur teknis pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri dan

masyarakat saat ini. Jenis Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya: (1) Informasi Pembangunan Daerah, mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD. (2) Informasi Keuangan Daerah, mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. (3) Informasi Pemerintah Daerah Lainnya, mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selamat satu tahun, PERDA, dan lainnya.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Langkah nyata pemerintah yang membantu pemerintah daerah menjalankan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan (Nurlillah, 2014). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa sistem pengendalian intern merupakan proses penting dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 (2008) Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa komponen yang membentuk sistem pengendalian antara lain :

- (1) Pengendalian Lingkungan
- (2) Penilaian Risiko
- (3) Pengendalian Kegiatan
- (4) Komunikasi dan Informasi
- (5) Pemantauan Pengendalian Intern.

Penelitian Aditya (2017) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal. Hal ini didukung oleh fakta bahwa laporan keuangan tersebut dibuat secara relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah, ada langkah-langkah dan proses yang harus dilakukan yang diatur oleh sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi ini bergantung pada sistem pengendalian intern (SPI) dan kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh seberapa baiknya sistem pengendalian internnya. Menurut Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas

Laporan Keuangan Pemda (2008: 14), "Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini terwujud jika entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara Sistem Pengendalian Intern yang memadai,"

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 134 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan gubernur, bupati, atau walikota untuk mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di pemerintah daerah yang dipimpinnya untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibuat suatu sistem yang akan mengatur seluruh proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan transaksi keuangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem akuntansi. Pada pemerintah daerah, Sistem Akuntansi ditetapkan dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah bagian integral dari sistem pengendalian intern. Kualitas laporan keuangan diukur oleh kesesuaian dengan SAP dan sistem pengendalian internnya. Untuk alasan ini, pemerintah daerah harus membuat, menerapkan, dan menjaga sistem pengendalian intern yang efektif untuk menghasilkan data keuangan yang dapat diandalkan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jika Sumber Daya Manusia memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi, kualitas laporan keuangan daerah juga akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan serta pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Sebaliknya jika Sumber Daya Manusia tidak memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi, pelaksanaan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas tidak dapat diterapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014), laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan bernilai tinggi dihasilkan oleh sumber daya manusia yang berkompetensi, mahir dalam pengolahan informasi, dan bertanggung jawab atas kualitas laporan. Sebaliknya, laporan tersebut tidak berkualitas dalam fungsi pengambilan keputusan jika sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan sistem dan kualitas laporan.

Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

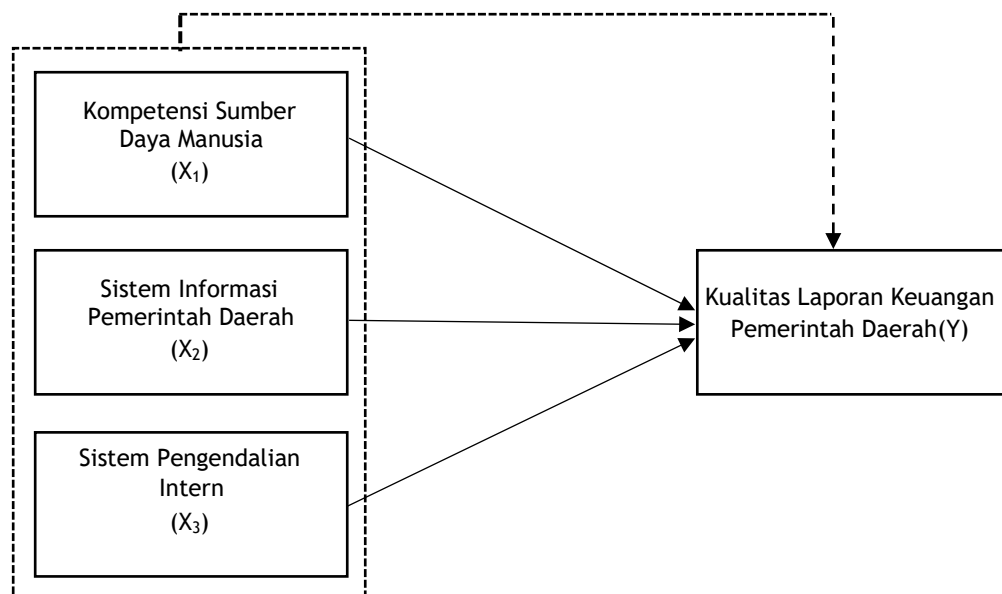
Sistem informasi pemerintah daerah merupakan suatu support system dalam pengembangan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang

terpadu secara nasional dan terintegrasi dalam suatu kesatuan yang utuh demi mendukung pencapaian Good governance. Untuk mewujudkan good governance maka pembangunan Sistem Informasi Pemerintah Daerah wajib didasarkan pada kebutuhan masyarakat, adanya kepemimpinan, regulasi, serta tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas agar menghasilkan kualitas laporan keuangan yang diharapkan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ditemukannya penyimpangan terus-menerus dalam laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi karakteristik atau nilai informasi yang diperlukan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK menghasilkan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” Beberapa dari opini ini disebabkan oleh kekurangan sistem pengendalian intern pemerintah daerah yang relevan (BPK, 2011). Peraturan Pemerintah Nomor 60 (2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengatur pengendalian intern pemerintah pusat dan daerah. Salah satu kriteria yang digunakan untuk memberikan opini laporan keuangan adalah tingkat keberhasilan

Model Penelitian



METODE

Desain penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal, yang dikenal sebagai hubungan sebab akibat, yang bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik dan berkualitas, dan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti yaitu

pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern. Dengan populasi dalam penelitian ini adalah 42 SKPD di Provinsi DKI Jakarta dan sampel penelitian ini mencakup 42 bendahara pengeluaran pada 42 SKPD di Provinsi DKI Jakarta. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber data primer dan kuesioner sebagai metode pengumpulan data.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan standar kualitas pelaporan keuangan sebagai ukuran normatif yang harus ditetapkan dalam informasi akuntansi agar mencapai tujuannya.

Variabel Independen

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatannya sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.	1. Pengetahuan 2. Pegawai yang telah melakukan pelatihan 3. Keterampilan 4. Pengalaman 5. Tanggung Jawab	Interval
Sistem Informasi pemerintah Daerah SIPD (X2)	Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah suatu sistem data tentang pembangunan daerah yang didokumentasikan, diadministrasikan, dan diolah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan,	1. Tingkat kecepatan 2. Tingkat efisiensi waktu 3. Tingkat kualitas hasil 4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memberikan kemudahan dalam menyusun laporan keuangan, serta bermanfaat	Interval

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.		
Sistem Pengendalian Internal (X3)	Siklus tindakan dan kegiatan terus menerus yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh staf atau pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern	Interval
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan standar kualitas pelaporan keuangan sebagai ukuran normative yang harus ditetapkan dalam informasi akuntansi agar mencapai tujuannya.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dipahami 4. Dapat dibandingkan 5. Materialitas 6. Konservatisme	Interval

Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu statistic yang digunakan untuk menganalisa data dengan memberikan gambaran bagaimana data dikumpulkan. Selain itu menu statistic deskriptif menampilkan nilai maksumun, minimum, nilai rata-rata, standar deviasi, dan varians masing-masing variabel.

Uji Kualitas Data

Pengukuran dan pengujian kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Jika instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki keabsahan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) yang tinggi, data penelitian tidak akan bermanfaat. Maka seharusnya kuesioner diuji keabsahan dan keandalannya terlebih dahulu sehingga menghasilkan data yang akurat.

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari penelitian benar-benar valid dan alat ukur yang digunakan, yaitu kuesioner, adalah valid. Ini dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi atau rhitung dari variabel penelitian dengan nilai rtabel. Kriteria untuk uji validitas kuesioner adalah

sebagai berikut:

- a. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka pertanyaan dinyatakan valid.
- b. Jika r_{hitung} kurang dari r_{tabel} , maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi seberapa reliabel suatu kuesioner yang menunjukkan suatu konstruk atau variabel. Kuesioner dianggap reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Uji statistik *cronbach alpha* digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas pengamatan; nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 dianggap sebagai konstruk atau variabel yang reliabel (Ghozali, 2013)

Uji Asumsi Klasik

Data untuk regresi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus terdistribusi dengan normal, tidak mengandung autokorelasi, tidak terdapat multikolinieritas, serta tidak bersifat heteroskedastisitas. Jika model regresi telah memenuhi semua persyaratan tersebut, maka dapat dikatakan regresi tersebut adalah BLUE yang merupakan singkatan dari *Best Linear Unbiased Estimator* (estimator yang terbaik, linier, dan tidak bias).

1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas Data digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan menggunakan statistik parametrik kemudian jika data tidak terdistribusi normal maka menggunakan statistik non parametrik. Normalitas data dapat diketahui melalui uji *Kolmogorov-Smirnov* yang dilakukan dengan melihat angka probabilitas dengan ketentuan (Ghozali, 2013):

- a. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, distribusi tersebut dianggap tidak normal.
- b. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, distribusi dianggap normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan varians antara pengamatan dalam model regresi. Untuk mengetahui apakah ada heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat kriteria:

1. Heteroskedastisitas terjadi jika ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang teratur.
2. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, dan titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
3. Dengan demikian asumsi dasar bahwa variasi residual sama untuk semua

pengamatan terpenuhi.

3. Uji Multikoleniaritas

Menurut Ghozali (2013) Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menentukan apakah ada atau tidak korelasi di antara variabel bebas (independent) melalui model regresi.

Menurut (Ghozali, 2013), variabel independen dianggap ortogonal jika nilai korelasi mereka sama dengan nol. Untuk itu diperlukan uji multikoleniaritas terhadap setiap data variabel bebas yaitu dengan :

- a. Perhatikan angka statistik kollinearitas yang ditunjukkan oleh Nilai faktor variasi inflasi (VIF). Jika nilai VIF lebih dari 10, maka Variabel bebas yang ada memiliki masalah multikoleniaritas.
- b. Melihat nilai *tolerance* pada output penilaian multikoleniaritas yang tidak menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,010 akan memberikan kenyataan bahwa tidak terjadi masalah multikoleniaritas.

4. Uji Auto Korelasi

Tujuan dari uji autokorelasi untuk menentukan apakah ada korelasi antara kesalahan penggunaan periode t dan kesalahan pada periode $t-1$ dalam model regresi linier. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji statistik *Durbin Watson* (DW) digunakan untuk memastikan apakah ada autokorelasi dalam penelitian ini dengan ketentuan sebagai berikut: (1) angka DW di bawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif; (2) angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi; (3) angka DW diatas +2 berarti terjadi autokorelasi negatif.

Uji Hipotesis Penelitian

Dengan menggunakan uji hipotesis ini, kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melakukan ini, kami menggunakan uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*), uji statistik F, dan uji statistik t.

1. Uji Simultan (Uji-F)

Pada dasarnya, uji simultan F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dalam model mempengaruhi variabel dependen/terikat secara bersama-sama. Metode pengujian terdiri dari dua kriteria:

- a. Nilai signifikan $< 0,05$ menunjukkan bahwa H_a diterima, yang berarti bahwa variabel bebas secara keseluruhan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H_a ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara keseluruhan tidak mempengaruhi variabel terikat.

2. Uji Parsial (Uji t)

Pengaruh satu variabel independen terhadap variasi variabel dependen dapat ditunjukkan dengan uji statistik t. H_0 ditolak dan H_a diterima jika tingkat signifikan dibawah 0,05. Sebuah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan persyaratan berikut:

- Jika t_{hitung} kurang dari t_{tabel} , H_0 diterima atau H_1 ditolak yang menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , H_0 ditolak atau H_1 diterima yang menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (Adjuster R^2)

Koefisien deteminan (*Adjuster R^2*) digunakan untuk menentukan seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen yang berbeda. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1. Nilai yang lebih kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang lebih besar menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat besar.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan hubungan antara lebih dari satu variabel independent dan sebuah variabel dependen; lebih khusus lagi, tujuannya adalah untuk mengevaluasi pengaruh setiap variabel x terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e = Y$$

Keterangan:

- Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
a : Konstanta
b : Koefisiensi regresi
 X_1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia
 X_2 : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
 X_3 : Sistem Pengendalian Intern
e : *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisi Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	42	3.42	5.00	4.2498	.45782
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	42	3.50	5.00	4.1919	.47373
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X ₂)	42	3.25	5.00	4.2960	.56032
Sistem Pengendalian Intern (X ₃)	42	2.40	5.00	3.8300	.55851
Valid N (listwise)	42				

Berdasarkan hasil dari tabel statistik deskriptif di atas, diketahui bahwa N=42 yang memiliki arti yaitu jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 42 sampel yang terdiri dari 42 bendahara pengeluaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan variabel dependen yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern. Penilaian statistik deskriptif didasarkan pada rentang penilaian 1 - 5, dimana 1 menunjukkan sangat rendah, 2 menunjukkan rendah, 3 menunjukkan sedang, 4 menunjukkan tinggi, dan 5 menunjukan sangat tinggi. Hasil penilaian responden atas variabel-variabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Dari skala 1 (satu) sangat rendah dan 5 (lima) sangat tinggi dalam analisis deskriptif variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 4,2498 atau tinggi, berarti bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat baik. Ini menunjukkan bahwa laporan tersebut memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan yaitu Relevan, Andal, Dapat Dipahami, Dapat Dibandingkan, Material dan Konservatif.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia senilai rata-rata (*mean*) yaitu 4,1919 artinya responden mempersepsikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah tinggi. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang tinggi mengindikasikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Pengetahuan pada bidang

Akuntansi, telah mengikuti Pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta memiliki Keterampilan dan Tanggung Jawab pekerjaan dalam membuat Laporan Keuangan.

3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah senilai rata-rata (*mean*) yaitu 4,2960 artinya responden mempersepsikan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah tinggi. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang tinggi mengindikasikan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah telah memenuhi aspek sesuai dengan indikator yaitu sistem yang memiliki Tingkat kecepatan dan kemudahan dalam hal penyelesaian pekerjaan membuat laporan keuangan, memastikan waktu yang tepat dan hasil yang sesuai dengan harapan, dan memberikan informasi yang membantu dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas.
4. Sistem Pengendalian senilai rata-rata (*mean*) yaitu 3,8300 artinya responden mempersepsikan bahwa Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sedang. Sistem Pengendalian Intern yang sedang mengindikasikan bahwa kegiatan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan untuk mendukung berjalannya Sistem Pengendalian Intern yang ada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum berjalan secara maksimal.

Uji Kualitas Data

Karena jenis data penelitian adalah data primer, validitas dan reliabilitas harus diuji seperti berikut:

1. Hasil Uji Validitas

Hasil dari uji validitas terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern dinyatakan valid karena seluruh nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} . Nilai r_{tabel} dicari pada tingkat signifikansi 0,050 dengan jumlah data $N=42$ atau $DF-2 = 42-2 = 40$ maka r_{tabel} sebesar 0.3044. Oleh karena itu, semua pertanyaan dalam survei dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan untuk digunakan sebagai instrument kuesioner.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Indikator	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Taraf Sig.	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Relevan	KLK1	0.789	0.3044	0,050	Valid
		KLK2	0.641	0.3044	0,050	Valid
		KLK3	0.577	0.3044	0,050	Valid
		KLK4	0.580	0.3044	0,050	Valid
		KLK5	0.727	0.3044	0,050	Valid
	Andal	KLK6	0.778	0.3044	0,050	Valid
		KLK7	0.575	0.3044	0,050	Valid

Variabel	Indikator	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Taraf Sig.	Keterangan
		KLK8	0.720	0.3044	0,050	Valid
		KLK9	0.748	0.3044	0,050	Valid
		KLK10	0.761	0.3044	0,050	Valid
	Dapat Dibandingkan	KLK11	0.801	0.3044	0,050	Valid
		KLK12	0.799	0.3044	0,050	Valid
		KLK13	0.671	0.3044	0,050	Valid
	Dapat Dipahami	KLK14	0.793	0.3044	0,050	Valid
		KLK15	0.737	0.3044	0,050	Valid
	Materialitas	KLK16	0.657	0.3044	0,050	Valid
		KLK17	0.709	0.3044	0,050	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	Pengetahuan	KLK18	0.640	0.3044	0,050	Valid
		KLK19	0.617	0.3044	0,050	Valid
	Pelatihan	KSDM1	0.539	0.3044	0,050	Valid
		KSDM2	0.653	0.3044	0,050	Valid
		KSDM3	0.762	0.3044	0,050	Valid
		KSDM4	0.742	0.3044	0,050	Valid
	Keterampilan	KSDM5	0.639	0.3044	0,050	Valid
		KSDM6	0.544	0.3044	0,050	Valid
		KSDM7	0.811	0.3044	0,050	Valid
		KSDM8	0.772	0.3044	0,050	Valid
	Pengalaman	KSDM9	0.769	0.3044	0,050	Valid
		KSDM10	0.844	0.3044	0,050	Valid
	Tanggung Jawab	KSDM11	0.732	0.3044	0,050	Valid
		KSDM12	0.658	0.3044	0,050	Valid
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X ₂)	Tingkat Kecepatan	KSDM13	0.692	0.3044	0,050	Valid
		KSDM14	0.594	0.3044	0,050	Valid
	Efisiensi Waktu	SIPD1	0.784	0.3044	0,050	Valid
		SIPD2	0.867	0.3044	0,050	Valid
	Kualitas Hasil	SIPD3	0.892	0.3044	0,050	Valid
		SIPD4	0.723	0.3044	0,050	Valid
	Kemudahan & Manfaat	SIPD5	0.873	0.3044	0,050	Valid
		SIPD6	0.873	0.3044	0,050	Valid
Sistem Pengendalian Intern (X ₃)	Lingkungan Pengendalian	SIPD7	0.786	0.3044	0,050	Valid
		SIPD8	0.720	0.3044	0,050	Valid
		SPI1	0.671	0.3044	0,050	Valid
		SPI2	0.750	0.3044	0,050	Valid
		SPI3	0.771	0.3044	0,050	Valid
		SPI4	0.662	0.3044	0,050	Valid
		SPI5	0.673	0.3044	0,050	Valid

Variabel	Indikator	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Taraf Sig.	Keterangan
	Penilaian Resiko	SPI6	0.687	0.3044	0,050	Valid
		SPI7	0.817	0.3044	0,050	Valid
	Kegiatan Pengendalian	SPI8	0.810	0.3044	0,050	Valid
		SPI9	0.794	0.3044	0,050	Valid
		SPI10	0.735	0.3044	0,050	Valid
	Informasi&Ko munikasi	SPI11	0.818	0.3044	0,050	Valid
		SPI12	0.808	0.3044	0,050	Valid
		SPI13	0.754	0.3044	0,050	Valid
	Pemantauan Pengendalian Intern	SPI14	0.656	0.3044	0,050	Valid
		SPI15	0.758	0.3044	0,050	Valid

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel ringkasan hasil uji reliabilitas data menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki angka *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari nilai minimal *Cronbach Alpha* 0,600. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa alat penelitian yang digunakan untuk mengukur keempat variabel dalam penelitian dapat dianggap handal atau reliabel.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	19	0,940	0,600	Reliable
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	14	0,914	0,600	Reliable
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X ₂)	8	0,925	0,600	Reliable
Sistem Pengendalian Intern (X ₃)	15	0,941	0,600	Reliable

Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal. Ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov untuk menguji normalitas residual dari variabel independen dan variabel dependen penelitian. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka populasi data berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

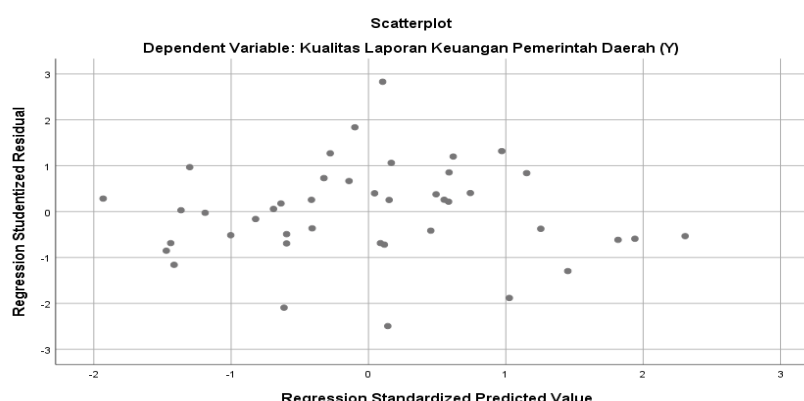
		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000

	Std. Deviation	4.83908359
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.082
	Negative	-.087
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel normalitas, kami menemukan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,087 dan signifikansi adalah 0,200 atau nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variasi residual dalam model yang tidak homogen untuk semua pengamatan dikenal sebagai heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk melakukan uji heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik scatterplot, yang merupakan grafik yang biasa digunakan untuk melihat pola hubungan antara dua variabel.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot

Hasil pengujian heterokedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik *scatterplot* tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak menunjukkan pola yang jelas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami heterokedastisitas atau berkondisi homokedastisitas.

3. Hasil Uji Multikolonieritas

Tujuan Uji multikolonoeritas adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independent dalam model regresi. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi dievaluasi untuk menentukan apakah ada atau tidaknya

multikolonieritas di dalam model regresi penelitian ini. Gejala multikolonieritas tidak terjadi jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,010.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardize d Coefficients		Standardize d Coefficient s	Collineari ty Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Toleranc e	VIF
1 (Constant)	2.307	8.628			
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	.655	.140	.498	.714	1.401
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X_2)	.605	.211	.312	.688	1.453
Sistem Pengendalian Intern (X_3)	.334	.096	.321	.954	1.049

Tabel hasil uji multikolonieritas diatas menunjukkan bahwa nilai toleransi masing-masing variabel independen mendekati 1, dan nilai VIF masing-masing variabel independent juga tidak lebih dari 10. Ini menunjukkan bahwa model regresi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami multikolonieritas antar variabel independen.

4. Hasil Uji Auto Korelasi

Tabel 7. Hasil Uji Auto Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.831 ^a	.691	.667	5.02647	1.839

Hasil uji auto korelasi menunjukkan bahwa nilai durbin-watson sebesar 1.839, yang akan dibandingkan dengan nilai durbin-watson pada tingkat signifikan 5%. Nilai durbin-watson ini lebih besar dari batas atas (du) yaitu 1.6617 dan lebih rendah dari (4-du) $(4-1.6617) = 2,3383$, atau dapat digambarkan sebagai berikut: $du < dw < 4-du = 1.6617 < 1.839 < 2.3383$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi penelitian ini.

Uji Hipotesis Penelitian

1. Uji Simultan (Uji-F)

Tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 akan digunakan untuk menguji hipotesis. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka hipotesis

dianggap diterima. Ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen serta sebaliknya.

Tabel 8. Hasil Uji-F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2148.033	3	716.011	28.340	.000 ^b
Residual	960.086	38	25.265		
Total	3108.119	41			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern (X₃), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁), Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X₂)

$$F\text{-Tabel} = (n-k) = (42-3) = F\text{-Tabel } 39 = 2.85$$

Tabel hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 28,340 dan nilai F_{tabel} sebesar 2.85. Nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} yang berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern secara bersamaan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, berdasarkan tingkat signifikansi, nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 atau dibawah 5%. Kesimpulannya secara simultan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Uji Parsial (Uji-t)

Tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 akan digunakan untuk menguji hipotesis. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka hipotesis dianggap diterima. Ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen serta sebaliknya.

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.307	8.628		.267	.791
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	.655	.140	.498	4.670	.000
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X ₂)	.605	.211	.312	2.867	.007
Sistem Pengendalian Intern	.334	.096	.321	3.479	.001

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(X ₃)					

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan tabel hasil Uji t diatas, terlihat bahwa dari ketiga variabel independen dalam regresi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia menghasilkan nilai koefisien parameter 0,655 dengan tingkat signifikansi $(0,000) < 0,05$, dan variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah menghasilkan nilai koefisien parameter 0,605 dengan tingkat signifikansi $(0,007) < 0,05$ serta variabel Sistem Pengendalian Intern menghasilkan nilai koefisien parameter 0,334 dengan tingkat signifikansi $(0,001) < 0,05$.

3. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinan (R^2) adalah ukuran seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 harus berkisar antara 0 dan 1, yang berarti bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya, nilai R^2 yang besar menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831 ^a	.691	.667	5.02647

Tabel hasil uji koefisien determinasi di atas menunjukkan bahwa nilai R adalah 0,831, yang menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat (lebih dari 0,5) antara variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dan tiga variabel independennya. Namun karena jumlah variabel independen lebih dari dua, nilai *R Square* yang disesuaikan adalah 0,667. Angka tersebut menunjukkan pengaruh besar pengaruh variabel X₁ hingga X₃ terhadap variabel Y (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) sebesar 66,7% secara gabungan. sedangkan sisanya 33,3% dipengaruhi oleh faktor eksternal lain di luar penelitian ini seperti pemahaman teknologi informasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.307	8.628		.267	.791
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	.655	.140	.498	4.670	.000
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X ₂)	.605	.211	.312	2.867	.007
Sistem Pengendalian Intern (X ₃)	.334	.096	.321	3.479	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Ditunjukkan dalam tabel hasil uji regresi linear berganda di atas, model regresi linear berganda ditunjukkan dengan persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 2,307 + 0,655x_1 + 0,605x_2 + 0,334x_3 + e$$

Dari persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (a)

Berdasarkan hasil regresi, koefisien konstanta sebesar 2,307 menunjukkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bernilai 2.307 jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan.

2. Koefisien Regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia (b₁)

Koefisien Regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,655 dari persamaan regresi menunjukkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 65,5 % jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia meningkat sebesar 100% dan variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan.

3. Koefisien Regresi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (b₂)

Koefisien Sistem Informasi Pemerintah Daerah dari persamaan regresi adalah 0,605, yang berarti bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 60,5% jika variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah meningkat sebesar 100% sedangkan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan.

4. Koefisien Regresi Sistem Pengendalian Intern (b₃)

Koefisien Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,334 dari persamaan regresi menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 33,4% jika variabel Sistem Pengendalian Intern meningkat sebesar 100% sedangkan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah tetap sama demikian juga sebaliknya.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat diketahui pada Tabel 4.6 Hasil uji-f dimana nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < \alpha = 0,05$). Hal ini sangat wajar jika keseluruhan variabel tersebut mampu berpengaruh secara simultan dikarenakan semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah yang baik, dan diterapkannya sistem pengendalian intern yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Menurut Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pembuat laporan keuangan memiliki kompetensi dalam akuntansi. Ini juga dapat dilihat dari fakta bahwa mayoritas responden memiliki Pendidikan Strata 1 (S1) pada bidang studi Akuntansi dan didukung oleh Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dirancang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sehingga dapat menunjang terhadap keberlangsungan sistem dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah (SAP) serta didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang cukup baik dan cukup kuat untuk menciptakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas sehingga mampu memenuhi karakteristik kualitatif Laporan Keuangan seperti yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Praktek ini menunjukkan bendaharawan SKPD Pemerintah Daerah telah menerapkan praktek yang seharusnya sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan sehingga dapat menerapkan praktek normatif dalam penerapan akuntansi. Hal ini telah mendukung teori akuntansi normatif yang menjadi landasan bahwa kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan prakteknya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Rizka (2020) membuktikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafila Mahruzia (2021) yang membuktikan bahwa Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh nilai Signifikan maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Dalam laporan keuangan, jelas bahwa kompetensi sumber daya manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan di setiap instansi. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah para pegawai di Satuan Perangkat Daerah atau di Badan Keuangan Daerah yang memiliki kewajiban untuk melakukan atau menyusun laporan keuangan. Sumber Daya Manusia yang kompeten sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas karena laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, Akuntansi keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Bendaharawan SKPD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Pengetahuan pada bidang Akuntansi dengan mengikuti Pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta memiliki latar belakang Pendidikan Strata 1 (S1) pada bidang studi akuntansi yang mempelajari ilmu akuntansi, memiliki Keterampilan dan Tanggung Jawab pekerjaan sehingga mampu mengembangkan potensi diri dalam menyusun dan membuat Laporan Keuangan yang berkualitas serta memenuhi karakteristik kualitatif Laporan Keuangan seperti yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyandari & Triyono (2017) yang membuktikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2017) yang membuktikan bahwa Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh nilai Signifikan maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi pemerintah daerah (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Hal yang mendasar dan penting dari penerapan Sistem informasi pemerintah daerah adalah demi mendukung

pencapaian *Good governance*. Untuk mewujudkan *good governance* maka pembangunan Sistem Informasi Pemerintah Daerah wajib didasarkan pada kebutuhan masyarakat, adanya kepemimpinan, regulasi, serta tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas agar menghasilkan kualitas laporan keuangan yang diharapkan.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah menjadi bagian e-government yang memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah serta dapat mendorong transparansi dan keterbukaan publik di daerah (Sudianing & Seputra, 2019). Hal ini didukung dengan adanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem ini dirancang untuk menjadi lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel dan memiliki kecepatan, efisiensi waktu, kualitas hasil yang tinggi. Ini memberikan kemudahan untuk menyajikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hafila Mahruzia (2021) yang membuktikan bahwa Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh nilai Signifikan maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka Kualitas Laporan Keuangan akan semakin meningkat karena Sistem Pengendalian Internal merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan seberapa baik Kualitas Laporan Keuangan khususnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal ternyata menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada kenyataannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menjalankan kegiatan pengendalian sesuai yang digariskan oleh peraturan pemerintah, hal ini dikarenakan pengendalian intern pada setiap SKPD mampu dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses

akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan Sistem Pengendalian Internal mampu meningkatkan realibilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi serta memudahkan proses audit laporan keuangan. Hal tersebut didukung dengan adanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan atau monitoring secara rutin yang dilakukan oleh pimpinan maupun pegawai pada setiap SKPD sehingga dapat mewujudkan Sistem Pengendalian Intern yang baik, semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula dan risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisir. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rifky et al (2017) yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Cahyandari & Triyono (2017) yang menunjukkan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah disampaikan sebelumnya pada penelitian ini menemukan beberapa temuan yang dianggap perlu untuk dinyatakan agar mampu mendukung hasil penelitian ini dan dapat membantu penelitian di masa yang akan datang. Temuan-temuan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas sebab, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal memiliki peran penting dalam menentukan seberapa baik Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan. Untuk mengoptimalkan Kualitas Laporan Keuangan maka dapat dilakukan dengan meningkatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seperti meningkatkan Pengetahuan, Pelatihan sehingga mengetahui cara menyusun laporan keuangan yang berkualitas, Pengalaman serta Tanggung Jawab pada Kompetensi Sumber Daya Manusia, tingkat kecepatan, efisiensi waktu, kualitas hasil, serta kemudahan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah sehingga dapat menciptakan suatu sistem yang adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel serta lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan (monitoring) pada Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelitian ini mendukung pada teori akuntansi normatif dan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 01 yang menetapkan semua persyaratan untuk penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan minimal isi laporan keuangan untuk

memenuhi tujuan umum laporan keuangan, yaitu memenuhi kebutuhan umum pengguna laporan keuangan.

Keterbatasan Penelitian

Selain temuan di atas peneliti menemukan keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan hanya 3 variabel, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal sehingga ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi, peran inspektorat daerah dan komitmen organisasi.
2. Karena metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau survei yang salah satu kelemahan dari metode ini adalah kemungkinan adanya respon yang bias dari para responden. Potensi bias karena perbedaan cara peneliti dan responden dalam menjawab pertanyaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial dari sistem informasi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial dari sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Saran

Berdasarkan beberapa simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah (Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta)
 - a. SKPD Provinsi DKI Jakarta harus merekomendasikan bendaharawan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang strata 2 (S2), Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan yang diperoleh tentang bagaimana membuat laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan untuk menciptakan laporan

keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami dan konservatif sesuai dengan karakteristik laporan keuangan.

- b. SKPD Provinsi DKI Jakarta harus memberikan beasiswa kepada bendaharawan yang ingin melanjutkan ke jenjang strata 2 (S2). Hal ini diharapkan akan mendorong semangat belajar para bendaharawan untuk menghasilkan pengetahuan sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.
 - c. SKPD Provinsi DKI Jakarta harus membuat Standar Operasional Prosedur untuk Sistem Pengendalian Intern agar pimpinan atau pegawai yang bertugas dapat melakukan pemantauan pengendalian secara rutin setiap minggu atau setiap bulan.
 - d. SKPD Provinsi DKI Jakarta hendaknya mendorong para bendaharawan untuk mengikuti Pendidikan program berkelanjutan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehingga diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkesinambungan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, oleh karenanya bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan Kualitas Laporan Keuangan
 - b. Jumlah sampel dalam penelitian ini masih sebatas bendahara pengeluaran, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel sehingga gambaran hasil penelitian lebih mendekati kondisi yang sebenarnya
 - c. Melengkapi metode penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung agar memperoleh data yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Armel, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 105-119.
- BPK. (2011). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011*. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Cahyandari, D. A., & Triyono. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ihsanti, E. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. (Studi Empiris pada SKPD Kab.Lima Puluh Kota)Padang*. Universitas Negeri Padang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Mahruzia, H. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. UPN Veteran Jatim.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.)). Andi.
- Peraturan Kepala BKN Nomor 11. (2008). *Pedoman Penilaian Kompetensi PNS Dalam Jabatan Struktural*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. In *Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60. (2008). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Permendagri Nomor 70. (2019). *Sistem Informasi Pemerintah Daerah*. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Perpres Nomor 39. (2019). *Satu Data Indonesia*. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112*.
- Perpres Nomor 95. (2018). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Rifky, A. M., Sri, R., & Muslih, M. (2017). *Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Universitas Komputer Indonesia.
- Sanjaya, A. (2017). Sanjaya, Aditya. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderas. *JOM Fekom*, 4(1), 366-380.
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 1-22.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Alfabeta).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14. (2008). Keterbukaan Informasi Publik. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. (2014). Pemerintahan Daerah. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25. (2004). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. In *Tambahahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7. (2013). Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan. In *Tambahahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400*.

